

MENDESAK KOMITMEN NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN*

Oleh
Dr. Rochmat Wahab, MA

Pengantar

Persaingan bebas yang semakin mengglobal menjadikan pendidikan sebagai wahana yang sangat menentukan, karena pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas manusia sebagai pelaku utamanya. Agar bangsa Indonesia tetap eksis dan dapat berperan aktif, maka sumber daya manusianya, maka perlu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas pula.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Selain itu juga mengembangkan dan menyebarkan ipteks serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.(PP 30/1990).

Menyadari hal tersebut kiranya sangat jelas bahwa keberadaan perguruan tinggi sangatlah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai andalan utama dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian negara tidak dapat mengelakkan kehadiran perguruan tinggi. Walaupun perguruan tinggi dipandang strategis, hingga kini angka partisipasi kasar (APK) baru mencapai 12,8 %. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia belum mampu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Posisi Perguruan Tinggi dalam Kehidupan Bernegara

Posisi perguruan tinggi pada dasarnya sangatlah strategis di dalam pembangunan bangsa, terlebih-lebih di era kompetisi dewasa ini, karena perguruan tinggi secara potensial merupakan institusi yang sangat bertanggung jawab dalam menghasilkan sumber daya yang handal. Karena itulah upaya pembinaan perguruan tinggi perlu terus diupayakan. Satryo Soemantri B. (Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, 2001) menegaskan bahwa arah pembinaan perguruan tinggi, di antaranya sebagai berikut: (1) merupakan bagian integral dari usaha pembangunan nasional maupun daerah; (2) merupakan penghubung antara dunia ipteks dan kebutuhan masyarakat; (3) melaksanakan pendidikan berdasarkan pola pemikiran yang analitik dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan pandangan masa depan; (4) berpartisipasi dalam perbaikan serta pengembangan mutu kehidupan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penerapannya, pengertian dan kerja sama internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia; dan (5) memungkinkan terlaksananya pengembangan seluruh kemampuan serta kepribadian manusia, mobilitas dalam memperoleh pengalaman pendidikan, diversifikasi dan

**Dibahas dalam Workshop Pendidikan yang diselenggarakan oleh LABDA Jogjakarta, BEM KM UGM, BEM UNY pada 25 Septemebr 2004 di Wisma Sargedede Jl. Pramuka Yogyakarta.*

demokratisasi dalam pendidikan dan proses belajar, mobilisasi sumber masyarakat untuk pendidikan, dan pertumbuhan keairahan riset.

Wujud perguruan tinggi dewasa di satu sisi dewasa ini cukup menggembirakan, karena berada dalam pembinaan pola tunggal, yang tidak ada lagi dikotomi PTN dan PTS yang dimanifestasikan melalui pembentukan Badan akreditasi Nasional (BAN). Yang menjadi beda hanya pada sektor pengelolaan dan sumber pembiayaannya. Seiring dengan ini juga dikembangkan paradigma baru pendidikan tinggi yang bertumpu kepada tiga pilar utama, yakni kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi, akuntabilitas (accountability), dan jaminan mutu (quality assurance). Kemandirian dalam pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan menajerial saja, melainkan juga persoalan substansi akademik. Akuntabilitas hendaknya diartikan bukan saja terhadap pemerintah sebagai Pembina atau pemberi dana dan sumber daya lainnya, melainkan juga terhadap masyarakat pemakai hasil lulusan dan hasil pengembangan iptek, termasuk terhadap organisasi profesi dan dunia usaha-industri. Akhirnya jaminan mutu perlu terus diupayakan secara dinamis seiring dengan tuntutan lapangan dan persaingan global.

Pendidikan Tinggi merupakan proses yang mahal

Dewasa ini sering terlontar tuntutan masyarakat adanya pendidikan murah dan berkualitas. Secara emosional setiap orang sungguh memberikan dukungan yang sangat positif terhadap ungkapan tersebut. Namun bagaimana mewujudkannya, tentu tidaklah mudah, karena sangat dibutuhkan idealisme pelaku yang sangat luar biasa.

Djoko Santoso (2000), menyatakan bahwa pendidikan tinggi pada umumnya dan pendidikan teknologi pada khususnya merupakan suatu proses pendidikan yang juga merupakan proses peradaban yang mahal. Hal ini terjadi karena apa yang harus dihasilkan harus bersifat profesional, sehingga menjurus kepada sifat "*cost center*". Kebutuhan yang besar antara lain kebutuhan untuk penelitian. Pernyataan ini memberikan isyarat bahwa untuk membangun perguruan tinggi yang berkualitas sangatlah diperlukan biaya yang mahal.

Dalam menghadapi perguruan tinggi yang berbiaya tinggi seharusnya tidak menjebak kita untuk berhenti sampai di sini, yang lebih penting adalah bagaimana mengupayakan dana yang diperlukan itu tidak banyak membebani mahasiswa. Untuk itulah diperlukan kepiawaian pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan secara lebih profesional.

Pendidikan Tinggi : *Public goods* atau *Private goods*

Pendidikan pada hakekatnya menjadi hajat orang banyak, bahkan semua anak bangsa, sehingga pendidikan pada dasarnya merupakan *public goods*, terutama jika dikaitkan dengan pendidikan dasar sembilan tahun dengan standar kualitas minimal. Bagaimana dengan pendidikan tinggi? Di satu sisi pendidikan tinggi merupakan *public goods* jika dimaksudkan untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang memang menjadi kebutuhan dasar anak bangsa dan negara, namun di sisi lain pendidikan

tinggi merupakan private goods jika kehadirannya menawarkan pilihan bagi masyarakat.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas semakin jelas, bahwa kehadiran PTN dan PTS yang memberikan banyak pilihan kepada masyarakat tidak bisa dilepaskan dari visi dan misinya. Pemerintah seharusnya benar-benar adil dalam mengembangkan kebijakannya dan mengimplemmentasikannya, dengan tanpa ada tendensi untuk semakin membebani masyarakat dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Tanggung jawab Pemerintah terhadap Perguruan Tinggi

Pada dasarnya pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap eksistensi dan pengembangan perguruan tinggi, di samping orangtua dan masyarakat sebagai pengguna lulusan. Sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah, ada sejumlah upaya yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah (baru) ke depan di antaranya:

1. Melaksanakan kendali manajemen perguruan tinggi dengan melakukan akreditasi secara bertanggung jawab.
2. Melakukan rekonstruksi pola pemberian dana secara lebih adil kepada perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
3. Memberikan tindakan tegas kepada pelaku pelanggaran baik secara institusional maupun individual, terutama dalam pemberian gelar atau ijazah.
4. Memberikan dukungan dana yang memadai bagi penyelenggaraan program studi tertentu yang menjadi kunci hajat bangsa dan masyarakat.
5. Memberikan dukungan penuh dalam pembiayaan studi bagi yang potensial, tetapi tidak memiliki kemampuan cukup secara ekonomis.
6. Memberikan perlindungan dan jaminan hak cipta yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama yang di jajaran perguruan tinggi.
7. Memberikan jaminan dan penghargaan terhadap dunia usaha dan bisnis bagi yang membangun kerjasama dalam riset dan kegiatan pendukung akademik lainnya, di samping memberikan sanksi kepada mereka yang tertutup dalam bekerja sama dengan perguruan tinggi.
8. Menjamin terjadinya transparansi pengelolaan perguruan tinggi yang selama ini masih belum menggembirakan.
9. Mengendalikan rekrutmen lulusan di berbagai dunia kerja yang bebas KKN, guna menjaga kegairahan mahasiswa selama proses pendidikannya.
10. Melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan program pendidikan baik pada PTN atau PTS, sehingga dapat menjamin keberlanjutan institusi.

Penutup

Demikianlah beberapa hal penting yang dapat menjadi trigger dalam rangkaian Workshop Pendidikan tentang Demokratisasi Pendidikan di Perguruan Tinggi, semoga dapat memberikan kontribusi bagi terbentuknya forum yang mampu memberikan pencerahan terhadap kehidupan pendidikan di Indonesia. Amin

